

**PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI**

**A. Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Strategis tahun 2013-2018 meliputi 6 program dan 36 kegiatan.

**Program** meliputi :

1. Pengembangan Produk Hukum
2. Bantuan Hukum
3. Pembinaan dan Dokumentasi Hukum
4. Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
5. Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

**Kegiatan** meliputi :

1. Penyusunan Raperda
2. Penyusunan PERGUB
3. Evaluasi dan Kajian Produk Hukum
4. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
5. Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/walikota
6. Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota
7. Rapat Konsultasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
8. Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
9. Pelatihan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah
10. Penangan Perkara
11. Harmonisasi NPHD
12. Pendampingan Hukum
13. Peningkatan Pengetahuan Pejabat terhadap Tata Usaha Negara
14. Peningkatan Pengetahuan Pejabat Dalam Penanganan Sengketa Hukum
15. Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah HAM
16. Diseminasi HAM
17. Peningkatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
18. Menghimpun dan Menyebarkan Produk Hukum Pusat dan Daerah
19. Pelatihan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
20. Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum Pusat dan Daerah
21. Rapat Koordinasi Hukum dan HAM

22. Pelayanan Administrasi Perkantoran
23. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
24. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
26. Pengkajian Produk Hukum Kab./Kota
27. Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Kab./Kota
28. Penyusunan Produk Hukum Penetapan
29. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
30. Penyediaan Alat Tulis Kantor
31. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
32. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
36. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

## **B. Indikator Kinerja**

Sebagai alat ukur pencapaian sasaran, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali menetapkan indikator kinerja masing-masing program yang dilaksanakan. Indikator kinerja ini mengacu pada indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.